

Nomor SOP			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Sekretaris  <u>Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si.</u> Pembina Utama Madya (IV/c) NIP : 19631222 198608 1 001
Tanggal Pembuatan	12 JANUARI 2021		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	TAHUN 2021		
Disahkan oleh	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN		
Nama SOP	PENGELOLAAN JDIH		

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Kualifikasi Pelaksana
S1; D3.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Keterkaitan

1. SOP Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
2. SOP Fasilitas Penyusunan Peraturan DPRD
3. SOP Fasilitas Rapat-Rapat

Peringatan

1. Tanpa adanya SOP dapat mengakibatkan ketidakpastian tugas dalam pengelolaan JDIH.
2. mengakibatkan terganggunya pelaksanaan TUPOKSI akibat dari ketidakpastian tugas dalam fasilitasi kepada DPRD Kabupaten Pangandaran dan masyarakat.

Peralatan/ Perlengkapan :

1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait,
2. Komputer,
3. ATK,
4. Jadwal penyusunan,
5. Risalah Rapat,
6. Dokumentasi.

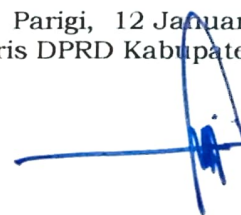
Pencatatan dan Pendataan :

LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN PRODUK HUKUM DAERAH
(PERATURAN DAERAH) MELALUI JDIH

TAHAPAN	PENDAMPING BAPEMPERDA, KOMISI, FRAKSI, PANSUS	PENGELOLA ADM JDIH/ OPERATOR JDIH	KASUBAG KHP	KABAG	SETWAN	MUTU BAKU			KETERANGAN
						PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
Kasubag KHP menerima Risalah hasil pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran	1					Risalah Rapat berikut dokumentasi visual/fhoto/vidio	1 Hari	Risalah Rapat	
Kasubag KHP membuat konsep bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran			2				1 Hari	Konsep naskah bahan unggah lengkap dengan fhoto	Fhoto-fhoto (dokumentasi)dipilih mana yang dapat diunggah dan tidak
Konsep bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Pengelola JDIH untuk diketik		3					1 Hari	Naskah bahan unggah lengkap dengan fhoto	
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Kasubag KHP untuk dikoreksi			4				1 Hari	Naskah bahan unggah lengkap dengan fhoto	Naskah hasil koreksi naik ke Kabag, atau kembali diperbaiki (kalau ada yg salah)

Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Kabag Kajian dan Legislasi untuk dikoreksi							2 Jam	Naskah bahan unggah lengkap dengan photo	Naskah hasil koreksi naik ke Sekwan, atau kembali diperbaiki (kalau ada yg salah)
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran disampaikan ke Sekwan untuk dikoreksi							2 Jam	Naskah bahan unggah lengkap dengan photo	Naskah hasil koreksi disetujui untuk diunggah, atau diperbaiki (kalau ada yang salah)
Bahan unggah terkait pembahasan Raperda/NA/produk hukum lainnya yang dibahas oleh DPRD Kab. Pangandaran hasil koreksi Sekwan disampaikan ke Kasubag KHP melalui Kabag							1 Hari	Dokumen Peraturan atau Risalah lainnya yang disetujui untuk diunggah	
Bahan unggah hasil koreksi Sekwan diteruskan kepada operator untuk diunggah ke JDIH							1 Hari	Naskah dipublikasi melalui JDIH	

Parigi, 12 Januari 2021
Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran



Drs. YAYAT KISWAYAT, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19631222 198608 1 001